BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Humas pemerintah memiliki peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pelestarian budaya dengan masyarakat luas. Terlihat pada Kampung Adat Cireundeu, yang mampu mempertahankan eksistensinya melalui dukungan aktif pemerintah daerah melalui upaya-upaya berkelanjutan. Melalui peran humas pemerintah, Kampung Adat Cireundeu terus dikembangkan sebagai ikon budaya dan identitas nilai-nilai Sunda yang hidup di tengah masyarakat Kota Cimahi.

Keunikan budaya, identitas pangan, dan pengakuan formal tersebut menjadi keunikan dalam menyelenggarakan program sebagai salah satu upaya menjaga eksistensi Kampung Adat Cireundeu dengan strategi komunikasi pemerintah. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) menjalankan berbagai strategi pelestarian salah satunya dengan pengakuan formal melalui Surat Keputusan (SK) pengakuan Kampung Adat Cireundeu sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) pada Desember 2024 yang menunjukan adanya pengakuan negara terhadap masyarakat dan budaya adat dalam memperkuat hak-hak tradisionalnya.

Upaya lain juga dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi, salah satunya melalui kegiatan kebudayaan yang bersifat partisipatif, yaitu Festival Cireundeu. Festival budaya ini diselenggarakan secara rutin dari 2024 hingga 2025 setiap satu tahun sekali oleh

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) yang bekerja sama dengan masyarakat adat setempat. Festival Cirendeu menampilkan berbagai potensi budaya, termasuk upacara adat, pertunjukan angklung buncis, helaran dongdang yang melibatkan 15 kelurahan, *exhibition* permainan tradisional, pagelaran wayang golek, dan beberapa penampilan tradisional lainnya.

Kegiatan Festival Cireundeu ini didasari oleh potensi Kampung Adat Cireundeu yang kaya akan komoditas adat dan budaya serta penetapan Desa Wisata melalui SK (Surat Keputusan) WaliKota pada tahun 2024. Penetapan ini mendorong Humas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi untuk merancang dan memberikan ruang strategis bagi Cireundeu sebagai destinasi wisata budaya yang penting dan representatif sekaligus memperkenalkan kekayaan dan warisan budaya lokal.

Kegiatan seperti ini menunjukkan bagaimana humas pemerintah dapat menggunakan acara budaya sebagai alat pelestarian dan strategi dalam membangun *image*, memengaruhi opini, serta menggerakkan partisipasi publik. Seorang humas pemerintahan (*government public relations*) dituntut menguasai keterampilan teknis dalam menyebarkan informasi untuk berbagai tujuan, baik untuk membangun citra, memengaruhi opini, maupun menggerakkan partisipasi publik yang dilakukan melalui publikasi dengan beragam saluran komunikasi, termasuk media digital agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau audiens secara efektif.

Pada konteks ini, Humas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi memanfaatkan media sosial *Instagram* @disbubparpora.cimahi serta website resmi www.cimahikota.go.id dan www.ppid.cimahikota.go.id sebagai alat publikasi dalam menyebarkan informasi terkait rangkaian kegiatan festival dan ajakan untuk memeriahkan kegiatan Cireundeu Festival.

Peran humas pemerintahan (*government public relations*) juga berfungsi sebagai elemen strategis dalam mendukung suksesnya program-program pemerintah dan menjaga reputasi birokrasi. Pada proses pelaksanaannya, Festival Cireundeu tidak lepas dari adanya sejumlah kritik dari masyarakat, khususnya terkait minimnya fasilitas pada hari pelaksanaan kegiatan. Humas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi, memanfaatkan media sosial sebagai sarana antisipasi dan sosialisasi guna merespons serta meredam kritik publik, sekaligus menjaga kepercayaan dan reputasi pemerintah di mata masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Media sosial juga dimanfaatkan oleh Humas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi sebagai sarana untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Festival Cireundeu. Terlihat pada pembentukan Cimitage Ambassador, yaitu *nano-influencer* untuk memperluas jangkauan informasi sekaligus mendorong interaksi aktif antara masyarakat dan pemerintah terkait kegiatan Festival Cireundeu.

Kegiatan Festival Cireundeu juga menarik keterlibatan publik yang terlihat dari aktivitas di media sosial, khususnya *Instagram*. Berbagai akun media massa lokal, pengunjung, serta masyarakat mengunggah dan membagikan dokumentasi seputar kegiatan Festival Cireundeu dengan menggunakan tagar #festivalcireundeu, yang diposting lebih dari 100 unggahan. Sejumlah media massa, seperti akun @infocimahi, detik.com, rri.co.id, Antara News, dan iNews Cimahi, juga mempublikasikan artikel serta membagikan informasi mengenai kegiatan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Festival Cireundeu mendapat perhatian secara langsung dengan memperoleh respons dan jangkauan yang luas di ruang digital melalui media sosial.

Melalui komunikasi yang terencana dan terarah, humas di dorong untuk menginformasikan kegiatan, membangun persepsi positif, meningkatkan antusiasme masyarakat, serta mempengaruhi opini publik agar lebih peduli dan terlibat dalam upaya pelestarian budaya lokal. Survei Status Literasi Digital Indonesia 2022 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu sumber informasi yang paling banyak diakses masyarakat Indonesia, dengan persentase sebesar 72,6%. Kondisi ini menunjukan penggunaan media sosial menjadi strategi penting terutama bagi humas pemerintah dalam upaya menyebarkan informasi dan promosi Kampung Adat Cirendeu melalui jangkauan informasi yang lebih luas dan cepat.

Terdapat penelitian serupa oleh Azijah, dkk, mengenai “Peran Pemerintah dalam Pelestarian Kampung Adat Cireundeu” yang sama-sama mengkaji Kampung Adat Cireundeu dan peran Pemerintah Daerah dengan melihat peran pemerintah

secara umum berdasarkan teori Inu Kencana Syafiie yang berfokus pada peranan pemerintah secara luas. Adapun penelitian oleh Sri dan Ridhah tentang peran *public relations* dalam mengoptimalkan eksistensi wisata Panorama Baru melalui media sosial yang menggunakan model 4 peranan PR Dozier dan Broom. Terdapat perbedaan pada kedua penelitian keduanya yang memberikan celah pada kajian penelitian mengenai peran humas pemerintah dalam mempertahankan eksistensi Kampung Adat dengan model 4 peranan PR Dozier dan Broom, dengan berfokus pada kehumasan pemerintaan, pelestarian budaya, dan kegiatan festival sebagai sarana komunikasi, yang belum dibahas pada kedua penelitian terdahulu tersebut.

Urgensi penelitian mengenai peran Humas Pemerintah Kota Cimahi terutama pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi dalam mempertahankan eksistensi Kampung Adat Cireundeu melalui kegiatan Festival Cireundeu. Peneliti menggunakan model peran PR Broom dan Dozier, berperan sebagai teknisi komunikasi (*communication technician*), penasehat ahli (*expert prescriber*), fasilitator komunikasi (*communication facilitator*), fasilitator pemecahan masalah (*problem-solving facilitato*r).

Melalui kerangka tersebut, penelitian ini mampu menilai bagaimana Humas Pemerintah Kota Cimahi dalam mengelola komunikasi publik, menjalankan strategi informasi, serta mengatasi isu atau kebutuhan komunikasi di masyarakat, khususnya terkait program dan publikasi kegiatan pemerintah. Pemahaman ini penting untuk melihat sejauh mana peran humas telah efektif dalam mendukung tujuan organisasi pemerintah, serta dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik di Kota Cimahi.

1.2. Fokus penelitian

Fokus penelitian pada penelitian "Peran Humas Pemerintah dalam Mempertahankan Eksistensi Kampung Adat Cireundeu melalui Festival Cirendeu (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi)", maka diperlukan pertanyaan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana peran Humas Pemerintah Kota Cimahi sebagai penasihat ahli (*expert prescriber)* dalam mempertahankan eksistensi Kampung Adat Cireundeu melalui kegiatan Festival Cireundeu?
2. Bagaimana peran humas sebagai teknisi komunikasi (*communication technician*) dalam mempertahankan eksistensi Kampung Adat Cireundeu melalui kegiatan Festival Cireundeu?
3. Bagaimana peran Humas Pemerintah Kota Cimahi sebagai pemecah masalah (*problem-solving facilitator)* dalam mempertahankan eksistensi Kampung Adat Cireundeu melalui kegiatan Festival Cireundeu?
4. Bagaimana peran Humas Pemerintah Kota Cimahi sebagai *communication facilitator* dalam mempertahankan eksistensi Kampung Adat Cireundeu melalui kegiatan Festival Cireundeu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Humas Pemerintah Kota Cimahi sebagai penasihat ahli (*expert prescriber)* dalam mempertahankan eksistensi Kampung Adat Cireundeu melalui kegiatan Festival Cireundeu.
2. Mengetahui peran humas sebagai teknisi komunikasi (*communication technician*) dalam mempertahankan eksistensi Kampung Adat Cireundeu melalui kegiatan Festival Cireundeu.
3. Mengetahui peran Humas Pemerintah Kota Cimahi sebagai pemecah masalah (*problem-solving facilitator)* dalam mempertahankan eksistensi Kampung Adat Cireundeu melalui kegiatan Festival Cireundeu
4. Mengetahui peran Humas Pemerintah Kota Cimahi sebagai *communication facilitator* dalam mempertahankan eksistensi Kampung Adat Cireundeu melalui kegiatan Festival Cireundeu

1.4. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Akademis

Penelitian ini bertujuan dapat memberikan pengembangan kajian kehumasan dalam bidang pemerintahan, khususnya terkait peran dan komunikasi humas pemerintah dalam pengelolaan dan pelestarian kampung adat berbasis budaya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan memperkaya literatur yang masih terbatas terkait praktik kehumasan pemerintah daerah dalam konteks pelestarian kampung adat, serta dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami komunikasi strategis pada humas di pemerintahan di tengah perkembangan ruang digital.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah maupun daerah-daerah lain untuk dapat melakukan upaya pengembangan dan pelestarian budaya dengan mengoptimalkan aktivitas kehumasan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam merancang strategi komunikasi yang efektif untuk memperkuat eksistensi dan peran kehumasan dalam dunia pemerintahan.

1.5. Landasan teoritis

Landasan teoritis merupakan dasar konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan serta memperkuat hubungan atau keterkaitan antarvariabel yang diteliti. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa landasan teoritis dapat digunakan sebagai dasar sekaligus sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis atau arah analisis penelitian. dalam menjelaskan hubungan antar variabel sebagai suatu kumpulan teori. Pada setiap penelitian, keberadaan landasan teoritis penting untuk menjelaskan konsep, definisi, serta teori-teori dasar yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat dan lebih terarah.

Penelitian ini menggunakan 4 peranan PR yang dikembangkan oleh Laurel Broom dan David Dozier pada tahun 1995, yang membagi peran PR berdasarkan sejauh mana keterlibatan praktisi PR dalam pengambilan keputusan organisasi. Dozier dan Broom membagi peran seorang humas ke dalam 4 klasifikasi, yaitu teknisi komunikasi (*communication technician)*, penasehat ahli *(expert prescriber)*,

fasilitator komunikasi (*communication facilitator*), fasilitator pemecahan masalah *(problem-solving facilitator)*. Keempat peran ini digunakan untuk memahami sejauh mana humas berfungsi secara teknis maupun strategis pada suatu organisasi.

a) Teknisi Komunikasi/*Communication Technician*

Peran humas sebagai pelaksana teknis komunikasi yang bertanggung jawab atas pembuatan dan penyebaran informasi, seperti penulisan siaran pers, pengelolaan media sosial, dokumentasi kegiatan, serta hubungan dengan media massa. Humas lebih berfokus pada aspek operasional komunikasi dengan *method of commmunication in organization* atau sistem komunikasi pada organisasi yang implementasinya disesuaikan atau tergantung organisasi.

b) Penasehat Ahli/*Expert Prescriber*

Humas diposisikan sebagai penasihat ahli/expert prescriber yang memiliki kemampuan untuk memberikan dan menemukan solusi dalam mengatasi masalah dalam hubungan dengan masyarakat (*public relationship)*. Pada peran ini, humas memiliki kewenangan untuk menganalisis permasalahan komunikasi, merumuskan strategi, serta memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan terkait langkah-langkah komunikasi yang tepat.

c) Fasilitator Komunikasi/*Communication Facilitator*

Humas berperan sebagai komunikator atau mediator dalam membantu organisasi dalam mendengar apa yang diinginkan publiknya. Humas juga dituntut dalam menjadi jembatan dengan mampu berkomunikasi dua arah dengan publik

mengenai kebijakan dari organisasi serta membangun kepercayaan dan pengertian dari dua belah pihak.

d) Fasilitator Pemecah Masalah/*Problem Solving Process Facilitator*

Peran humas sebagai pemecahan masalah menjadi salah satu bagian dalam menajemen dalam membantu pimpinan atau organisasi dalam menghadapi krisis yang mengancam organisasi. Peran ini dapat berupa masukan maupun tindakan dalam mengatasi persoalan secara rasional dan profesional. Model 4 peranan PR oleh Dozier dan Broom relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu memberikan kerangka analisis dalam melihat bagaimana peran humas dijalankan secara teknis dan strategis dalam instansi pemerintahan.

Model tersebut digunakan pada penelitian ini untuk menganalisis peran humas Pemerintah Kota Cimahi dalam mempertahankan eksistensi Kampung Adat Cireundeu melalui penyelenggaraan Festival Cireundeu, baik melalui aktivitas publikasi, perencanaan strategi komunikasi, fasilitasi hubungan dengan masyarakat, maupun keterlibatan dalam pemecahan permasalahan pelestarian budaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

1.6. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan bagian penelitian yang memuat pemahaman dasar mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Mulyono (2003) menjelaskan bahwa landasan konseptual disusun untuk memberikan dasar pemikiran dalam memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa landasan

konseptual menjadi dasar atau pondasi bagi peneliti untuk memahami konsep yang digunakan sebagai bagian dari pembahasan penelitian.

Landasan konseptual ini berfungsi sebagai panduan dalam mengarahkan jalannya penelitian. Raharjo (2023) menjelaskan bahwa landasan konseptual menjadi dasar atau panduan agar pembahasan penelitian memiliki arah yang jelas dan terstruktur. Fungsi tersebut membantu peneliti menyusun pembahasan secara sistematis, menjaga kesesuaian pembahasan dengan fokus penelitian, serta menghubungkan konsep-konsep yang digunakan dengan permasalahan yang dikaji.

A. Humas

Humas merupakan fungsi manajemen strategis yang berorientasi pada upaya membangun, menjaga, serta memperkuat hubungan antara organisasi dan publiknya. Jefkins (2004) menjelaskan definisi humas sebagai segala bentuk komunikasi yang direncanakan, baik internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan saling pengertian. Sehingga humas juga dapat dilihat sebagai persn strategis dalam membentuk dan memengaruhi persepsi publik terhadap organisasi melalui proses komunikasi yang terencana dan efektif.

Setiap lembaga atau instansi dalam melaksanakan program maupun kebijakan tentu mengharapkan keberhasilan serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Morisan (2010) menjelaskan bahwa peran dan fungsi hubungan masyarakat diwujudkan melalui program-program kehumasan yang dirancang secara terencana dan dijalankan dengan strategi komunikasi yang tepat agar dapat berlangsung secara efektif. Humas memiliki fungsi yang turut andil dalam mencapi keberhasilan

organisasi melalui tindakan-tindakan yang dirancang secara terstruktur dalam membangun penerimaan, dukungan, dan partisipasi publik

B. Humas Pemerintah

Humas dalam pemerintahan merupakan suatu fungsi yang dilakukan dalam menjembatani antara instansi dan masyarakat. Effendy (2002) menjelaskan bahwa humas pemerintah memiliki dua tugas utama, yaitu menyebarluaskan informasi secara berkesinambungan mengenai kebijakan, perencanaan, serta capaian yang telah diraih oleh pemerintah, sekaligus memberikan penjelasan dan edukasi kepada masyarakat terkait peraturan perundang-undangan serta berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Sehinngga peran humas disini tidak hanya berfokus pada manajemen internal tetapi juga pihsk-pihsk eksternal, termasuk masyarakat.

Ciri pemerintah yang baik yaitu pemerintahan yang demokratis, dan pemerintahan yang demokratis membutuhkan terjalinnya hubungan yang bertanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat yang berlandaskan pada kepentingan bersama. Peran humas menjadi sangat penting dan strategis, karena humas berfungsi sebagai cerminan atau wajah pemerintah dalam membangun citra positif melalui berbagai upaya komunikasi yang berorientasi pada kepentingan bersama, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI